

SKRIPSI
POLITIK PEMBANGUNAN DESA : STUDI KASUS DESA KARIANGO
KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG

Diajukan sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Program Prodi Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



NURHIDAYAT

E041191069

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

POLITIK PEMBANGUNAN DESA: STUDI KASUS DESA
KARIANGO KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN
PINRANG

Yang diajukan Oleh :

NURHIDAYAT

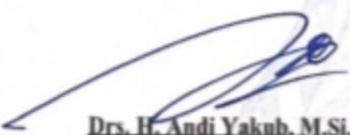
E041191069

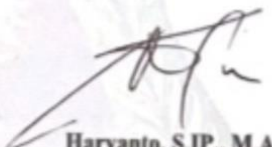
Telah dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi

Yang Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 196212311990031023


Haryanto, S.I.P., M.A.
NIP. 19861008 2019031009

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik




Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**POLITIK PEMBANGUNAN DESA : STUDI KASUS DESA KARIANGO KECAMATAN
LEMBANG KABUPATEN PINRANG**

Yang diajukan Oleh :

NURHIDAYAT

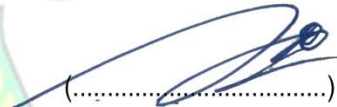
E041191069

**Dan dinyatakan Memenuhi Syarat Oleh Panitia Ujian Skripsi Departemen
Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin Pada Tanggal 23 Oktober 2023**

Menyetujui,

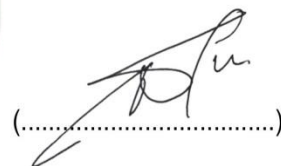
PANITIA UJIAN

Ketua : Drs. Andi Yakub, M. Si., Ph. D.




(.....)

Sekretaris : Haryanto, S. IP., M. A.




(.....)

Anggota : Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si



(.....)

Anggota : Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.



(.....)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURHIDAYAT

NIM : E041191069

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“POLITIK PEMBANGUNAN DESA : STUDI KASUS DESA KARIANGO KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Agustus 2023



NURHIDAYAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, sang ilahi atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Politik Pembangunan Desa: Studi Kasus desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”. Tak lupa juga, penulis haturkan shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda sang kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP).

Skripsi ini saya persembahkan pertama-tama kepada dua orang spesial yang sangat berjasa dan berperan besar di dalam hidup saya yaitu kedua orang tua saya, Bapak Usman dan Ibu Malang. yang telah menjadi orang tua terhebat, yang bekerja keras mencari nafkah, yang selalu sabar mendidik dan memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.

Dan tak lupa juga, terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing Bapak Drs. H. Yakub, M.Si.,ph.D. dan Bapak Haryanto, S.IP., M.A. yang telah dengan sabar membimbing penulis menulis skripsi ini dari awal proposal hingga ujian akhir

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Phil sukri, S.IP., M.Si., sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah memberi penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
2. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan kemahasiswaan, Ibu Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si., beserta segenap jajaran staf akademik, ada Pak Sutamin, Ibu Irma, dan Pak Herman.
3. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si., beserta segenap jajaran staf.
4. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si. beserta segenap jajaran staf.
5. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D., yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.
6. Dosen-dosen Departemen Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., Alm. Bapak Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag., Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A., Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.si., Ibu Dr.

Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Gustiana A Kambo, M.Si., Bapak Andi Naharuddin, S.IP., M.Si., Ibu Endang Sari, S.IP., M.Si., Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si., Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP., Bapak Prof. Dr. Muhammad M.Si., Bapak Haryanto, S.IP., M.A., Bapak Zulhajar, S.IP., M.A., dan Ibu Dian Ekawaty, S.IP., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.

7. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak Syamsuddin, S.T., dan Ibu Musriati S.E., yang telah membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan.
8. Arisandi yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang telah kebersamai meluangkan waktu tenaga dan pikiran serta sabar menghadapi tingkah penulis baik suka maupun duka.
9. Seluruh Teman-teman pengurus KMP UNHAS, Amazing 2019 yang suda seperti keluarga sendiri yang selalu ada kebersamai terimakasih telah memberikan keceriaan, memancarkan kebaikan dan memberikan pengalaman. Masing-masing dari kalian adalah tokoh dengan watak yang berbeda dalam cerita hidupku
10. Seluruh teman-teman Departemen Ilmu Politik angkatan 2019, yang telah kebersamai dari awal perkuliahan hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini.

Makassar, 12 Agustus 2023

NURHIDAYAT

ABSTRAK

NURHIDAYAT – E041191069. Politik Pembangunan Desa : Studi kasus Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten pinrang. Di bawah bimbingan Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D. sebagai pembimbing utama dan Haryanto, S.IP., M.A. sebagai pembimbing pendamping.

Skripsi ini mengkaji tentang politik pembangunan desa dalam studi kasus Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Pembangunan desa tertinggal merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan sebuah desa yang dihuni oleh masyarakat pedesaan dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik menjadi desa maju dengan masyarakat pedesaan yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan politik pembangunan yang ada di Desa Kariango menggunakan pemikiran Gabriel Almond tentang pembangunan politik dan juga konsep Indeks Desa Membangun. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara terhadap beberapa informan yang terkait dengan penelitian, serta melakukan observasi terjun langsung ke lokasi penelitian dan menggunakan studi kepustakaan sebagai data sekunder.

Hasil penelitian menggambarkan kurangnya sumber daya manusia dan minimnya perhatian dari pemerintah sehingga Desa Kariango yang sejarah pemekaran dari desa letta pada tahun 1989 yang resmi menjadi desa kariango pada tahun 1989 itu masih berstatus desa tertinggal dikarenakan akses menuju lokasi itu relatif sulit. Upaya yang dilakukan pemerintah Desa Kariango yaitu memberdayakan potensi yang ada guna untuk mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah sehingga desa yang tadinya masih berstatus tertinggal menjadi desa maju yang berada di Sulawesi Selatan.

Kata Kunci : Pembangunan, Desa Tertinggal, Akses Desa.

ABSTRACT

NURHIDAYAT – E041191069. Politics of Village Development : A case study of Kariango Village, Lembang District, Pinrang Regency. Under the guidance of Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D. as the main advisor and Haryanto, S.IP., M.A. as companion advisor.

This thesis examines the politics of village development in a case study of Kariango Village, Lembang Sub-district, Pinrang Regency. Underdeveloped village development is an effort to develop a village inhabited by rural communities with various socio-economic problems and physical limitations into a developed village with rural communities whose quality of life is the same or not far behind compared to other Indonesian communities.

This research uses a qualitative descriptive method to describe the politics of development in Kariango Village using Gabriel Almond's thoughts on political development and also the concept of the Village Development Index. The data collection technique used was interviews with several informants related to the research, as well as direct observation to the research location and using literature study as secondary data.

The results of the study illustrate the lack of human resources and the lack of attention from the government so that Kariango Village, which is the history of expansion from letta village in 1989 which officially became kariango village in 1989, is still a disadvantaged village status because access to the location is relatively difficult. The efforts made by the Kariango Village government are to empower the potential that exists in order to get special attention from the local government so that villages that were previously underdeveloped become developed villages in South Sulawesi.

Keywords: Development, Underdeveloped Villages, Village Access.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	I
HALAMAN PENERIMAAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN	II
ABSTRAK	VIII
<i>ABSTRACT</i>	IX
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR LAMPIRAN	XII
DAFTAR TABEL	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Secara Akademis	7
1.4.2 Secara Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Pembangunan Politik	13
2.2.1 Pemikiran Gabriel Almond Tentang Pembangunan Politik.....	22
2.2.2 Konsep Indeks Desa Membangun.....	27
2.3 Kerangka Pikir	32
2.4 Skema Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	35

3.1 Tipe dan Dasar Penelitian	35
3.2 Lokasi dan Objek Penelitian	36
3.3 Jenis Data	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Informan Penelitian.....	38
3.5 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV	42
4.1 Gambaran Umum Desa Kariango.....	42
BAB V	44
5.1 Sejarah Desa Kariango.....	44
5.2 Kondisi Sosial Masyarakat Desa Kariango.....	49
5.3 Potensi dan Masalah Desa Kariango	51
5.4 Politik Pembangunan Desa Kariango	62
5.5 Indeks Desa Membangun.....	64
BAB VI.....	68
6.1 Kesimpulan	68
6.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi 1. Kantor Desa Kariango	74
Dokumentasi 2. Jembatan Akses Utama Desa Kariango	75
Dokumentasi 3. Akses Jalan Desa Kariango	76
Dokumentasi 4. Wawancara Langsung Bersama Kepala Desa Kariango (Bpk. Muhammad Jafar, Selasa, 4 Juli 2023)	77
Dokumentasi 5. Wawancara Langsung Bersama Staff Desa Kariango (Bpk. Parman, Rabu, 5 Juli 2023)	78
Dokumentasi 6. Wawancara Langsung Bersama Warga Desa Kariango (Bpk. Kasran, Kamis, 6 Juli 2023)	79
Dokumentasi 7. Wawancara Langsung Bersama Warga Desa Kariango (NAMA, Kamis, 6 Juli 2023)	80

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 4.1	29
Tabel 4.2	45
Tabel 4.3	51
Gambar 3.1	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara adalah untuk men-sejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan desa tertinggal merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan sebuah desa yang dihuni oleh masyarakat pedesaan dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik menjadi desa maju dengan masyarakat pedesaan yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Dalam perkembangan era globalisasi seharusnya desa haruslah dikedepankan dikarenakan salah satu batu loncatan untuk membangun sebuah kota maupun sebuah negara diawali dari desa. Pembangunan yang selama ini lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi justru menciptakan kesenjangan antar wilayah yang semakin besar. Investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah Hiterland mengalami pengurasan sumber daya yang berlebihan.

Sebagai ilustrasi ketimpangan yang terjadi antar desa-kota, wilayah Indonesia Timur dan Barat, dan wilayah Jawa dan Luar Jawa. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bisa menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Indikator yang menjelaskan desa sangat tertinggal erat kaitannya dengan bidang ekonomi (rendahnya standar hidup), sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, karakteristik wilayah (seperti lokasi dan keadaan geomorfologis), rawan bencana dan konflik, serta kebijakan pembangunan yang tidak mengikutsertakan desa atau sangat jauh dari pusat pembangunan wilayah. Walaupun kebijakan sudah banyak ditempuh dalam mengembangkan wilayah dan memprioritaskan pembangunan desa tertinggal dalam waktu yang sudah ditentukan.

Menurut Todaro dalam Setiawan (2019:72) bahwa pembangunan merupakan proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap - sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional serta akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (inequality), dan pemberantasan kemiskinan absolut. Pembangunan sebagai suatu proses belajar. Pembangunan dapat dikatakan sebagai upaya untuk merealisasikan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Namun dalam upaya tersebut, seringkali terdapat suatu paradoks pembangunan seperti ketergantungan wilayah.

Pembangunan nasional mendorong berkembangnya pembangunan nasional dan lain pihak pembangunan nasional memperkuat pembangunan nasional. Keduanya antara pembangunan nasional dan pembangunan regional terdapat keterkaitan yang mengisi, sehingga membentuk struktur perekonomian yang kokoh dan kuat. Berbagai macam klasifikasi wilayah pada hakikatnya memperhatikan keanekaan potensi dan kondisi fisik dan ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, maka tingkat pertumbuhan wilayahnya berbeda-beda, dengan demikian kebijakan perataan tingkat pertumbuhan antar wilayah secara komprehensif dan merata ke seluruh wilayah. Dalam pelaksanaan pembangunan, terdapat para aktor yang menjalankan aktivitas politik (saling mempengaruhi satu sama lain berdasarkan kinerja) dalam pembangunan.

Menurut Warjio (2016: 140) politik pembangunan sebagai konsep diperlukan untuk menjelaskan bagaimana cara-cara (politik) atau strategi/aliran tertentu yang digunakan dalam konteks pembangunan mencapai sasarnya. Sesungguhnya pembangunan pada dasarnya adalah hasil dari proses politik yang dilakukan aktor-aktor di dalamnya, oleh pemerintah dengan perangkat-perangkat lain seperti lembaga, partai politik atau bahkan kelompok masyarakat.

Aktor-aktor dalam politik pembangunan bukan saja berasal dari dalam negara tetapi juga berasal dari luar negara. Artinya kepentingan internasional juga memainkan peranan penting dalam politik pembangunan. Secara lebih rinci, menurut Teori Maslow menyebutkan bahwa kegiatan pembangunan terdapat tiga kelompok aktor yang saling mempengaruhi didalamnya yaitu pemerintah selaku pemegang kebijakan, kemudian masyarakat yang dijadikan sebagai perspektif tujuan pembangunan, dan swasta sebagai aktor penunjang dalam pembangunan. Apabila ketiga kelompok tersebut terlibat aktif dalam kegiatan politik pembangunan, maka pembangunan tersebut akan mencapai tujuan intinya yaitu kesejahteraan masyarakat juga memainkan peranan penting dalam politik pembangunan. Jumlah desa sangat tertinggal di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan pada tahun 2022. Jumlahnya kini tinggal 11 desa. Angka itu menurun dibanding setahun sebelumnya 38 desa. Adapun 11 desa sangat tertinggal itu berada di tiga kabupaten yaitu Pinrang, Tana Toraja, dan Toraja Utara.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel Muh. Saleh mengatakan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengambil peran mengintervensi pemerintah desa dan daerah. Hal itu ditandai dengan penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Desa dan ditindaklanjuti Pergub Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Program Kegiatan Percepatan Pembangunan Desa.

Di Kabupaten Pinrang, empat desa berstatus sebagai desa sangat tertinggal. Sesuai data Indeks Desa Tertinggal (IDT) yang masuk dalam SK Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) ada empat desa yaitu Desa Basseang, Desa Kariango, Desa Lembang Mesakada, dan Desa Letta. Keempat desa ini semuanya berada di wilayah Kecamatan Lembang. Salah satu dari desa tertinggal yang berada di Indonesia bagian timur yaitu Sulawesi Selatan adalah tempat penelitian penulis Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Secara umum keadaan topografi Desa Kariango adalah daerah tertinggal yang dibagi tiga dusun yang diantaranya dusun Tondo Bunga, Buttu Batu dan Dusun Buttu Raja. Adapun Luas Desa Kariango sekitar 21,89 Km. Kondisi sosial Desa Kariango jumlah penduduknya terdiri 296 KK dengan total jumlah jiwa 1.196 orang. Rata-rata yang tinggal di Desa tersebut ekonominya bersumber dari hasil pertanian dan perkebunan adapun sebagian yang dijual untuk keperluan keberlangsungan hidup masyarakat Desa Kariango.

Desa Kariango adalah salah satu desa yang memiliki kondisi cukup

memprihatinkan. Terbatasnya akses untuk kendaraan roda empat bahkan kendaraan roda dua untuk sampai ke Desa Kariango. Beberapa waktu lalu seorang ibu hamil bahkan harus ditandu berjalan kaki sejauh 7 kilometer dari Desa Kariango menuju Puskesmas. Kecamatan Lembang karena ketiadaan transportasi dan belum memadainya fasilitas kesehatan untuk ibu hamil di tingkat desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Kariango membutuhkan perhatian yang lebih serius agar pembangunan menjangkau wilayah desa ini. Diperlukan sinergi antara pemerintah baik dari provinsi maupun kabupaten, pemerintah desa, masyarakat, dan juga pihak swasta untuk mempercepat pembangunan di Desa Kariango. Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“POLITIK PEMBANGUNAN DESA: STUDI KASUS DESA KARIANGO KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian yang telah disampaikan diatas dan berdasarkan latar belakang masalah dan luasnya cakupan judul, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah :

1. Mengapa Desa Kariango masih berstatus sebagai salah satu Desa Sangat Tertinggal ?
2. Bagaimana pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang dilakukan di Desa Kariango ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui mengapa Desa Kariango masih berstatus sebagai salah satu Desa Sangat Tertinggal.
2. Mengetahui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang dilakukan di Desa Kariango.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Akademis

Secara akademis, penelitian ini berguna sebagai bahan referensi peneliti lain yang juga mengambil tema tentang pembangunan politik ditingkat lokal maupun nasional dan memperluas ilmu mengenai sesuai dengan cakupan penelitian, dan juga diharapkan untuk mengembangkan pemikiran penulis itu sendiri tentang bagaimana politik pembangunan di Indonesia.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan referensi bagi para pembaca untuk mengetahui bagaimana pembangunan politik desa yang ada di Desa Kariango.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan mengenai pembangunan politik sebagai landasan teoritis dan alat analisis utama untuk melihat politik pembangunan terkait Desa Kariango sebagai salah satu desa sangat tertinggal di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Dalam bab ini juga diuraikan kerangka berpikir penelitian ini yang tergambar dalam skema pikir. Untuk menunjukkan kebaruan penelitian ini, disajikan pula beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi.

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yohansen Wyckliffe Gultom pada tahun 2021 dengan judul Pola Politik Pembangunan Desa di Indonesia Pasca Hadirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Politik Pembangunan Saemaul Undong di Korea Selatan Era Park Chung Hee (1963-1979). Penelitian ini menemukan bahwa kedua model pembangunan desa memiliki persamaan yaitu; 1.) Kedua desa dibangun

berdasarkan rentang waktu perencanaan berdasarkan suatu periode tertentu. Di Indonesia dikenal dengan RPJMDesa dan RKP. 2) Kedua pembangunan desa dengan kedua model tersebut diatas, sama-sama mengupayakan produk unggulan desa, dan. 3.) Kedua desa memiliki persamaan untuk mengupayakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun demikian, program Saemaul Undong di masa Park Chung Hee lebih topdown mengingat karakteristik pemimpin yang lebih militeristik dan keadaan Korea Selatan kala itu yang lebih mudah diorganisir akibat keterpurukan pasca perang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Helmi Dwi Agung Pambudi dan Nia Kurniasari pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Politik Pembangunan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini menemukan Terdapat tiga kelompok hasil klasifikasi aktor politik pembangunan selaku stakeholder penelitian yaitu aktor kunci, primer, dan tersier. Aktor kunci yaitu Bupati (Sekda), DPRD Komisi IV, Bapelitbangda, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial. Aktor Tersier yaitu Organisasi Masyarakat, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Akademisi. Sedangkan Aktor Primer yaitu Tokoh Masyarakat. DPRD Kabupaten Bandung Barat memiliki

pengaruh yang sangat tinggi dalam politik pembangunan sehingga memiliki daya saing yang sangat tinggi. Di sisi lain, Organisasi Masyarakat (Ormas) memiliki pengaruh yang paling rendah dikarenakan selain hal teknis, aktor tersebut kurang terlibat secara langsung dalam agenda pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Puput Ratnasari pada tahun 2020 dengan judul Politik Pembangunan Di Kota Palangka Raya Menuju Smart City Kota Palangka Raya. Penelitian ini menunjukkan pembangunan Kota Palangka Raya merupakan suatu usaha perubahan Kota Palangka Raya untuk menjadi kearah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, direncanakan secara sadar agar tercapai sesuai dengan tujuan berdasarkan norma-norma tertentu. Menuju modernitas secara bertahap dengan mendayagunakan potensi baik alam, manusia, maupun sosial dan budaya. Kesimpulannya, smart city harus mampu membuat masyarakatnya aktif dalam beraktivitas, melakukannya dengan tenang, aman, nyaman, senang, dan bahagia tinggal didalamnya dan yang paling penting lagi masyarakat sipil yang berada di Kota Palangka Raya dan individu-individu yang berada di Kota Palangka Raya

berperan dan berpartisipasi sebagai aktor dalam pembangunan.

4. Penelitian oleh Sumarni dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2020 dengan judul Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Pengembangan Desa Tertinggal (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Muaro Jambi). Penelitian ini menemukan Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menangani Desa Tertinggal di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi salah satunya dengan melakukan strategi dan meningkatkan kemandirian masyarakat dan Desa tertinggal dilakukan melalui: (1) Pengembangan ekonomi lokal seperti pembangunan infrastruktur dan pembangunan dibidang pertanian. (2) Pemberdayaan masyarakat Desa dalam pelaksanaannya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan serta program pembangunan Desa. (3) Penyediaan sarana dan prasarana Desa. (4) peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dunia usaha seperti UMKM dan koperasi Desa. (5) Melakukan

pembinaan dan pelatihan kepada setiap Desa untuk meningkatkan kemandirian Desa. Faktor penghambat dari pembangunan Desa adalah akses jarak yang relatif jauh, minimnya sumber daya manusia, sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing Desa, serta masih kurangnya tingkat partisipasi dan dukungan dari pihak masyarakat Desa, sehingga pembangunan untuk lebih maju masih kurang optimal. Upaya yang dilakukan oleh Dinas pemberdayaan masyarakat Desa berupa memberikan fasilitas pembangunan sekolah Paud, TK, pembangunan sekolah madrasah, memberikan fasilitas sarana dan prasarana dibidang pertanian berupa traktor, pembangunan pasar Desa, pembangunan posyandu, serta memberikan sarana dan prasarana dibidang kesehatan.

Dari keempat penelitian di atas yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, penelitian ini memiliki perbedaan untuk melihat mengapa Desa Kariango masih berstatus sebagai salah satu Desa Sangat Tertinggal dan bagaimana pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang dilakukan di Desa Kariango.. Peneliti tertarik untuk melihat mengapa dengan kucuran dana desa yang begitu besar ternyata masih ada Desa

Kariango di Kabupaten Pinrang yang memiliki ketertinggalan utamanya dari aspek pembangunan fisik.

2.2 Pembangunan Politik

Konsep pembangunan mengandung usaha berencana, mempunyai sasaran yang relatif jelas, prosesnya bertahap dan tidak terdapat kekerasan. Pembangunan politik dapat dilihat sebagai implikasi politik dari pembangunan yang sasarannya antara lain mengembangkan kapasitas- kapasitas sistem politik sehingga mampu memelihara dirinya. Selanjutnya modernisasi bisa diartikan sebagai proses perubahan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat hidup sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Karena itu modernisasi mengandung kondisi berupa sistem sosial yang bisa secara terus-menerus berinovasi tanpa mengalami disintegrasi, struktur sosial yang terdiferensiasi dan luwes, serta kerangka sosial yang menyediakan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan bagi kehidupan dalam dunia yang secara teknologi sudah maju (After dalam Ramlan Surbakti, 1992). Dengan demikian dapat dipahami bahwa perubahan politik meliputi semua ciri pembangunan dan modernisasi politik yang objeknya antara lain mencakup perubahan sistem nilai politik, struktur kekuasaan dan strategi kebijaksanaan umum.

Gagasan pembangunan politik sendiri pada awalnya muncul dan dipergunakan oleh para pejabat pemerintahan, bukannya ilmuwan (Lucian W. Pye, 1964).¹ Konsep itu digunakan untuk memberi nama pada jenis pembangunan lainnya yang lebih luas dibandingkan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Ukuran pembangunan ekonomi pada saat kemunculan gagasan tersebut sering disimplifikasi hingga terbatas pada pertumbuhan ekonomi (GDP) dan pendapatan per kapita (per capita GNP). Ukuran pembangunan sosial di dalam banyak literatur juga sering mengalami simplifikasi pada aspek sosial ekonominya, seperti tingkat kesejahteraan, kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan. Sementara itu, pada saat yang sama, pemerintah negara-negara baru melakukan pembangunan institusi politik yang tidak diukur dalam konsepsi pembangunan ekonomi dan sosial. Aktivitas pembangunan yang dimaksud misalnya mencakup pembentukan budaya politik, pengembangan lembaga-lembaga politik dan birokrasi, pemberdayaan politik masyarakat, mobilisasi pembangunan, pembinaan integrasi nasional, dan sebagainya. Dalam banyak dokumen dan retorika politik negara-negara, baik negara maju maupun negara berkembang, pada saat itu aktivitas-aktivitas

¹ McLean, Iain dan Alistair McMillan (Eds.). *Oxford Concise Dictionary of Politics*. Oxford: Oxford University Press. 2003.

pembangunan non sosial-ekonomi tersebut yang kemudian disebut sebagai pembangunan politik (Pye, 1964 dan J. Roland Pennock, 1965).

Banyak ilmuwan yang telah mencoba merumuskan definisi tentang pembangunan politik. Di antaranya adalah Peter Burnell dan Gabriel A. Almond, sekedar memberikan contoh beberapa definisi. Menurut Burnell (2003), secara umum pembangunan politik adalah pembangunan institusi, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang membentuk sistem kekuasaan politik di dalam suatu masyarakat. Menurut Gabriel A. Almond (1966), pembangunan politik adalah seperangkat struktur, proses, dan perubahan kebijakan politik yang terjadi di dalam konteks yang lebih luas dari modernisasi sosial-ekonomi. Pembangunan politik terjadi sebagian sebagai konsekuensi dari modernisasi dan semakin berkembang sebagai penyebab dari modernisasi. Selain dua definisi yang disebutkan di atas, masih banyak definisi lain yang telah coba dirumuskan oleh para ilmuwan politik. Pye (1964) di dalam karyanya yang berjudul "Aspects of Political Development" mencoba mengklasifikasikan definisi-definisi pembangunan politik ke dalam 10 kategori. Kesepuluh kategori tersebut adalah sebagai berikut.²

² Chilcote, Ronald H. *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*. Jakarta: Rajawali. 2003.

1. Pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi.
2. Pembangunan politik sebagai tipe politik dari masyarakat industri.
3. Pembangunan politik sebagai modernisasi politik.
4. Pembangunan politik sebagai operasi negara bangsa.
5. Pembangunan politik sebagai pembangunan administrasi dan hukum.
6. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa.
7. Pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi.
8. Pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur.
9. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan kekuasaan.
10. Pembangunan politik sebagai satu aspek proses perubahan sosial yang multidimensional.

Huntington, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya lebih cenderung membagi arah pembangunan politik ke dalam empat karakter, yaitu rasionalisasi, integrasi, demokrasi, dan partisipasi (mobilisasi). Rasionalisasi yang dimaksudkan oleh Huntington memerlukan perubahan dari partikularisme ke universalisme,

dari tumpang-tindih wewenang ke spesialisasi, dari askripsi ke prestasi, serta dari kecenderungan dan keberpihakan pada satu kelompok, agama atau ideologi ke arah netralitas. Integrasi nasional menuntut setiap bangsa untuk meminimalkan persaingan politik berdasarkan etnis dan mulai membangun bangsa berdasarkan identitas bersama. Krisis identitas bangsa harus diatasi dengan nation-building atau pembangunan karakter bangsa. Demokrasi yang dimaksudkan Huntington mencakup nilai-nilai pluralisme, persaingan sehat antar kelompok politik, serta perimbangan kekuasaan. Mobilisasi dalam konteks pembangunan politik dalam pandangan Huntington menyangkut mobilisasi masyarakat, dalam arti perubahan sosial yang dapat memengaruhi perubahan politik. Misalnya adalah pendidikan, urbanisasi, keterbukaan media massa, industrialisasi, perluasan pelayanan publik, peningkatan kapasitas pemerintah, pergeseran perhatian politik masyarakat dari masalah lokal ke masalah nasional, dan peningkatan partisipasi politik masyarakat. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan tentang definisi dari pembangunan politik. Pembangunan politik dapat dikatakan sebagai perubahan politik terencana dari suatu kondisi awal tertentu ke kondisi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dan melibatkan seluruh bagian dari masyarakatnya.

Komponen dari definisi tersebut adalah sebagai berikut.³ Dilakukan suatu perubahan politik. Perubahan politik tersebut terencana. Pemerintah merencanakan perubahan tersebut. Pelaksanaannya melibatkan dan menyangkut seluruh masyarakat. Perubahan dilakukan dari suatu kondisi awal (sering disebut tradisional) ke arah kondisi baru (sering disebut modern).

Secara terminologis, pembangunan politik mengandung makna perubahan terencana yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan melibatkan masyarakatnya dari suatu kondisi awal tertentu menuju kondisi lainnya. Term “melibatkan masyarakat” di sini memberikan penekanan akan pentingnya pembangunan politik bagi masyarakat, baik untuk terlibat di dalam proses aplikasinya maupun dalam menerima manfaatnya. Pembangunan politik yang ideal diharapkan dapat memobilisasi partisipasi masyarakat dalam menciptakan kestabilan dan integrasi. Sebaliknya, partisipasi masyarakat justru tidak diharapkan berkontribusi terhadap krisis dan konflik. Di dalam demokrasi perwakilan yang menjadi prinsip pemerintahan di hampir semua negara di dunia saat ini, lembaga perwakilan difungsikan sebagai suatu mekanisme penyelesaian konflik secara damai dan terlembaga. Konflik kepentingan yang ada di dalam masyarakat dilokalisasi dan diwakilkan kepada lembaga

³ Kingsbury, Damien. *Political Development*. London: Routledge. 2007.

perwakilan untuk memutuskan solusi yang adil dan dapat diterima.⁴

Legitimasi merupakan hal yang sangat penting bagi kemampuan bertahan (survivability) suatu pemerintahan. Legitimasi dapat kita artikan sebagai pengakuan atas keabsahan kekuasaan. Dasar dari legitimasi bisa formal dan nonformal. Legitimasi formal diperoleh melalui konstitusi, regulasi, dan pemilu. Sementara legitimasi nonformal diperoleh melalui prestasi atau performa positif di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Pembangunan politik yang dilakukan dengan baik oleh suatu negara dapat berfungsi membantu membangun basis legitimasi formal maupun nonformal. Pembangunan demokrasi dan penataan institusi dapat berfungsi membangun legitimasi formal. Sedangkan prestasi dalam memelihara stabilitas, mengembangkan kapasitas institusi dan aktor politik, serta memelihara integrasi nasional dapat menjadi basis legitimasi non-formal bagi suatu rezim pemerintahan.

Pembangunan masyarakat di bidang ekonomi dan sosial sangat terkait dengan pembangunan politik. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya di muka, pembangunan politik sering diperdebatkan sebagai prasyarat dari pembangunan ekonomi.

⁴ Lieberman, Robert C. (2002). "Ideas, Institutions, and Political Order: Explaining Political Change", *The American Political Science Review*, Vol. 96, No. 4.

Demikian juga sebaliknya, pembangunan ekonomi sebagai prasyarat pembangunan politik. Kita tidak akan menguraikan perdebatan tentang hubungan kausal antara pembangunan ekonomi dan politik. Namun yang penting untuk ditekankan di sini dalam kaitannya dengan fungsi pembangunan politik adalah bahwa pembangunan politik menyiratkan pembentukan sebuah masyarakat yang ideal. Melalui pembangunan politik, dibentuk suatu masyarakat yang memiliki budaya demokratis, menjunjung tinggi nilai kesetaraan, keadilan, keterbukaan, toleransi, dan kemitraan dengan pemerintah. Fungsi yang terakhir terkait dengan dimensi pembangunan kapasitas sistem politik untuk menghadapi persoalan-persoalan masyarakat. Pembangunan politik seyogyanya mampu menghasilkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan tugas eksekutif dan administratif. Kapasitas *good governance* sangat penting untuk dapat memanifestasikan suatu prosedur dan mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengekspresikan haknya dan berpartisipasi aktif di dalam pembangunan ekonomi, politik, maupun sosial.⁵ Disamping itu, konsep pembangunan politik mempunyai konotasi secara geografis, derivatif, teleologis, dan fungsional (Huntington dan Dominguez dalam Afan Gaffar,

⁵ Lane, Jan Erik, and Svante Ersson. *Ekonomi Politik Komparatif*. Jakarta: Rajawali. 1994.

1989). Pembangunan politik dalam konotasi geografis berarti terjadi proses perubahan politik pada negara- negara sedang berkembang dengan menggunakan konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh negara-negara maju, seperti konsep mengenai sosialisasi politik, komunikasi politik dan sebagainya. Itulah sebabnya pembangunan politik cenderung ditujukan untuk negara-negara sedang berkembang atas dasar pandangan bahwa di negara-negara sedang berkembang belum terjadi rasionalisasi, integrasi dan demokratisasi. Fenomena ini mengakibatkan timbulnya instabilitas politik yang mempengaruhi kapasitas sistem politik. Karena itu dilaksanakan pembangunan politik untuk mengatasi permasalahannya.

Pembangunan politik dalam arti derivatif dimaksudkan bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya. Karena itu pembangunan politik berkaitan erat dengan bidang- bidang pembangunan lain seperti ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Misalnya, keberhasilan pembangunan ekonomi akan mendorong terjadinya peningkatan proses pembangunan politik,

demikian pula sebaliknya. Kegagalan pembangunan dalam bidang politik juga akan menghambat proses pembangunan ekonomi. Begitu pula terjadinya stagnansi pembangunan sosial akan menimbulkan keterbelakangan ekonomi dan politik, sebab dalam kondisi yang demikian masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi ataupun pembangunan politik.

Oleh karena itu, pada dasarnya diperlukan keseimbangan tertentu pada semua bidang pembangunan baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan. Tingkat keseimbangan itu ditentukan oleh kondisi-kondisi yang ada dalam masing-masing bidang, dan juga oleh kondisi yang ada di luar setiap bidang. Tidak tercapainya titik kesimbangan itu dengan sendirinya menimbulkan tekanan-tekanan terhadap bidang-bidang tertentu, yang pada akhirnya juga berdampak terhadap sistem secara keseluruhan (Nazaruddin Syamsuddin, 1996).

2.2.1 Pemikiran Gabriel Almond Tentang Pembangunan

Politik

Menurut Gabriel A. Almond (1966), pembangunan politik adalah seperangkat struktur, proses, dan perubahan kebijakan politik yang terjadi di dalam konteks yang lebih luas dari modernisasi sosial-ekonomi. Pembangunan politik

terjadi sebagian sebagai konsekuensi dari modernisasi dan semakin berkembang sebagai penyebab dari modernisasi. Bagi Almond, pembangunan politik merupakan respons sistem politik terhadap perubahan dalam lingkungan masyarakat dan internasional, terutama respon sistem terhadap tantangan pembinaan bangsa, pembinaan negara, partisipasi, dan distribusi. Lucian W. Pye (1966) mengemukakan bahwa ciri-ciri pembangunan politik, yaitu equality (persamaan), capacity (kapasitas), dan differentiation and specialization (diferensiasi dan spesialisasi). Ketiga ciri ini dapat dipandang sebagai inti dari proses pembangunan politik.

Yang dimaksudkan kapasitas di sini adalah kemampuan sistem politik, yaitu mengenai output (hasil) sistem politik yang mampu mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Juga berkaitan kondisi dan prestasi pemerintah yang menyebabkan proses pelaksanaan kebijaksanaan umum menjadi efektif dan efisien. Akhirnya kapasitas sistem politik berhubungan pula dengan rasionalisasi administrasi dan orientasi sekuler terhadap kebijaksanaan umum. Mengenai kemampuan-kemampuan yang dimiliki sistem politik, menurut Almond dan Powell

(1966) terdapat beberapa jenis, seperti kemampuan distributif dan kemampuan responsif.

Kemampuan distributif berkaitan erat dengan kemampuan ekstraktif, sebab sesudah sistem politik mengelola sumber-sumber alam dan potensi manusia maka harus pula menunjukkan kemampuannya mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Distribusi barang-barang, jasa, kesempatan, status dan bahkan juga kehormatan dapat dipandang sebagai prestasi nyata sistem politik. Distribusi tersebut ditujukan kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pada hakikatnya apa yang harus didistribusikan bukan saja keuntungan-keuntungan, tetapi juga kerugian-kerugian, misalnya pendapatan negara (nasional) melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) didistribusikan untuk membiayai pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tetapi bila negara dalam keadaan kritis, misalnya menghadapi perang maka hal ini juga harus didistribusikan. Artinya setiap warga negara berkewajiban ikut serta dalam pembelaan negara.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah berkaitan dengan pemerataan distribusi, kecepatan

distribusi, dan penguasaan atas distribusinya. Tidak hanya terhadap hal-hal ini, permasalahan distributif pun dapat muncul dari persoalan pemaknaan terhadap hal-hal yang mestinya didistribusikan dan ke mana hal-hal itu harus didistribusikan.

Pada satu titik, dapat saja sistem politik itu terlihat positif karena mampu menjalankan fungsi distributifnya. Namun di sisi lain, dapat saja terjadi distribusi yang sudah berjalan itu dipandang belum maksimal karena terkait dengan persoalan penggunaan sumber daya ekstraktif dan landasan regulatif yang tidak diterapkan dan dijalankan secara maksimal pada sistem politik itu.

Kemampuan responsif adalah kemampuan daya tanggap sistem politik yang ditentukan oleh hubungan antara input (aspirasi masyarakat) dengan output (kebijakan pemerintah). Dalam perkembangannya, suatu sistem politik sering menghadapi tuntutan-tuntutan atau tekanan-tekanan yang datang dari lingkungan dalam ataupun lingkungan luar. Pertanyaan yang timbul ialah kepada siapa sistem politik bersifat tanggap?, Dalam bidang kebijakan apa sistem politik tanggap?, Bagaimana cara melaksanakan pola tingkah lakuyang tanggap itu?,

Dalam sistem kerajaan, di mana aktivitas birokrasi pemerintahan dikendalikan oleh raja bersama para pembantunya yang terdekat, hanya sedikit melibatkan diri terhadap tuntutan-tuntutan dari luar. Elit politik hampir selalu terikat pada satu sumber input sehingga kemampuan responsif semacam ini dianggap rendah. Sebaliknya, pada sistem politik yang terbuka luas terhadap pengaruh input dari kelompok-kelompok kepentingan atau partai politik, di mana kebijaksanaan elitnya peka dan tanggap, bisa dipandang kemampuan responsifnya tinggi.

Persoalannya tentu tak sekadar pada kecepatan suatu sistem politik dalam memberi respons atas berbagai tuntutan yang ada. Selain masalah kecepatan itu sendiri, hal lain dalam kapabilitas responsive yang perlu diperhatikan adalah pada kualitas respons yang diberikan dan sejauh mana respons tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak, termasuk oleh pihak yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan tuntutan yang berkembang. Dalam hal kapabilitas responsif ini pula kerap sekali pihak yang diberi mandat atau sudah memiliki mandat untuk merespons berbagai tuntutan ikut dipersoalkan.

2.2.2 Konsep Indeks Desa Membangun

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa didorong agar semakin maju, sehingga semakin kecil perbedaan kemajuannya antara kota dengan desa. Apabila perbedaan kemajuan desa dengan kota tidak jauh beda atau ketimpangannya rendah, maka diharapkan tidak terjadi urbanisasi, atau bahkan justru kembalinya potensi SDM desa dari kota ke desa. Tentu cara ini tidak mudah. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Butuh kerja keras menyiapkan sistem dan sarana untuk melakukan pembangunan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menganut dua pendekatan dalam pembangunan desa yaitu : “membangun desa dan desa membangun”. Pendekatan “membangun desa” merupakan perspektif

yang menempatkan kawasan perdesaan sebagai sasaran dan lokus inti pembangunan di satu sisi dan pendekatan “desa membangun” merupakan perspektif yang memposisikan dan memperankan pemerintah desa dan kelembagaannya sebagai subjek pembangun dan pemberdaya masyarakat desa disisi yang lain.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang kemudian diikuti dengan dikurukannya pendapatan transfer dana desa yang besarnya sangat fantastis, merupakan salah satu wujud dari komitmen dan kombinasi dua pendekatan tersebut. Dalam memahami dan memotret perkembangan desa, saat ini pemerintah melakukan pengukuran atau penilaian dengan menggunakan tolok ukur Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Indeks Ketahanan Sosial	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan
1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Modal Sosial 4. Permukiman	1. Keragaman Produksi Masyarakat 2. Akses Pusat Perdagangan dan Pasar 3. Akses Logistik 4. Akses Perbankan dan Kredit 5. Keterbukaan Wilayah	1. Kualitas Lingkungan 2. Bencana Alam 3. Tanggap Bencana

Tabel 4.1

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. IDM memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai

dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

IDM mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: Desa Sangat Tertinggal; Desa Tertinggal; Desa Berkembang; Desa Maju; dan Desa Mandiri. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap Desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan Desa Tertinggal. Indeks Desa Membangun merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. IDM didasarkan pada 3 (tiga) dimensi tersebut dan dikembangkan lebih lanjut dalam 22 Variabel dan 54 indikator.

Berikut ini batasan dan ciri dari kelima tingkat perkembangan desa, yaitu :

1. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
2. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
3. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
4. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas

hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya

5. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

2.3 Kerangka Pikir

Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Di Kabupaten Pinrang, empat desa berstatus sebagai desa sangat tertinggal. Sesuai data Indeks Desa Tertinggal (IDT) yang masuk dalam SK Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) ada empat desa yaitu Desa Basseang, Desa Kariango, Desa Lembang Mesakada, dan Desa Letta. Keempat desa ini semuanya berada di wilayah Kecamatan Lembang. Desa Kariango adalah salah satu desa yang memiliki kondisi cukup memprihatinkan. Tidak ada

akses untuk kendaraan roda empat bahkan kendaraan roda dua untuk sampai ke Desa Kariango. Tidak ada transportasi dan belum memadainya fasilitas kesehatan untuk ibu hamil di Desa Kariango. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Kariango membutuhkan perhatian yang lebih serius agar pembangunan menjangkau wilayah desa ini.

Pembangunan politik mengandung makna perubahan terencana yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan melibatkan masyarakatnya dari suatu kondisi awal tertentu menuju kondisi lainnya. Term “melibatkan masyarakat” di sini memberikan penekanan akan pentingnya pembangunan politik bagi masyarakat, baik untuk terlibat di dalam proses aplikasinya maupun dalam menerima manfaatnya. Desa Kariango di Kabupaten Pinrang sangat membutuhkan perubahan utamanya dalam bidang infrastruktur dan fasilitas publik agar dapat keluar dari status desa sangat tertinggal. Infrastruktur publik disini adalah sarana dan prasarana primer yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik. Fasilitas publik adalah sarana prasarana yang dapat digunakan bersama oleh masyarakat seperti sekolah dan puskesmas sebagaimana akses pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan sosial paling mendasar bagi masyarakat.

2.4 Skema Kerangka Pikir.

